



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 1089 -DPUTR/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Renja Perangkat Daerah disusun sistematis dengan memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana perubahan Renja setelah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan; ✓
- c. bahwa berdasarkan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeditbangda untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan disempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Melakukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2023 terutama terkait pagu dan terget indikator kinerja dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2023
- 2.2. Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

3.3. Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan

BAB IV Penutup

- KEDUA : Uraian sistematika Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Maksud disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023
- KEEMPAT : Tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2023 yaitu :
- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
 - b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;
 - d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator kinerja sasaran, outcome dan output yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Kepada Dinas selaku Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2023.
- KEENAM : Sekretaris Dinas, Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target outcome program yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat outcome.

KETUJUHH : Sub Koordinator atau Pejabat Fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target output kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat output.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep.1089 -DPUTR/2023

TANGGAL : 14 November 2023

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2023 merupakan penjabaran rencana kerja tahunan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Sebagai dasar kebijakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan hasil Evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan, serta mempertimbangkan pula aspirasi para pemangku kepentingan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, sejumlah peraturan Perundangan, Perda dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahan daerah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E. 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 26, Seri D);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024
14. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 903.22/ 1682 / Bappelitbangda tanggal 12 Mei 2023 tentang Tahapan dan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :
 1. Sebagai acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dan bagi masyarakat karena memuat kebijakan pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon yang memuat arah kebijakan pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.
 3. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk peningkatan kinerja pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023 adalah :
1. Menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan seluruh kegiatan perubahan pada Tahun 2023;
 2. Menjadi acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun Anggaran 2023 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN BERKENAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berkenan dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Renja Perubahan
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN

1.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja SKPD

1.2 Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan Evaluasi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan I, dilaksanakan untuk mengetahui realisasi program, kegiatan dan Sub. Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/keluaran yang direncanakan, mengetahui realisasi program, kegiatan dan Sub. Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, mengetahui realisasi program, kegiatan dan Sub. Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan dan Sub. Kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tahun Anggaran 2023 alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon sebesar Rp254.060.439.234 (dua ratus lima empat milyar enam puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) (Belanja Operasi dan Belanja Modal), dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp202.934.822.934 (dua ratus dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp40.622.801.300 (empat puluh milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus satu ribu tiga ratus rupiah) dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dengan realisasi anggaran (Keuangan) sampai dengan bulan Juni 2023 (Triwulan II) terealisasi sebesar Rp43.732.600.437 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 17,21 %, dapat terlihat pada tabel pada halaman berikut :

Rekap Realisasi Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan II

Kode Rek.	Uraian	Jumlah (Rp.)	REALISASI S,D Triwulan I		Sisa	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
5.	BELANJA DAERAH	254.060.439.234	43.732.600.437	17,21	210.327.838.797	82,79
5.1.	BELANJA OPERASI	93.014.008.734	27.552.486.037	29,62	65.461.522.697	70,38
5.1.01.	Belanja Pegawai	25.967.313.940	13.018.915.281	50,14	12.948.398.659	49,86
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.997.819.794	10.698.570.756	32,42	22.299.249.038	67,58
5.1.02.	Belanja Hibah	34.048.875.000	3.835.000.000	11,26	30.213.875.000	88,74
5.2.	BELANJA MODAL	161.046.430.500	16.180.114.400	10,05	144.866.316.100	89,95
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.447.141.000	11.665.000	0,12	9.435.476.000	99,88
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	151.599.289.500	16.168.449.400	10,67	135.430.840.100	89,33
JUMLAH BELANJA		254.060.439.234	43.732.600.437	17,21	210.327.838.797	82,79

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023 s.d Triwulan II

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPKD Kabupaten/Kota Thn Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten / Kota Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan RPKD Thn 2023)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Thn 2023 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6			7			8			10						13					14=7+13		
					K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp				K	Rp	
1	2	3	4	5	6			7			8			9						13			14=7+13			15=14/6 x100%	15
1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																											
1	Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten				Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap) (Satuan Prosen)	87	2.630.076.533.517	84,12	139.014.530.039	86	112.757.131.200	0	1.318.925.220	0	13.514.568.898	0	13.514.568.898	84,12	220.967.041.854	96,69	8,40						
	1.03.06.		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	4,82	87.747.330.994	5,48	15.632.441.280	4,57	11.769.554.700	0,00	32.817.180	0,00	153.624.140	0,00	153.624.140	5,48	15.786.065.420	113,69	27,76				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			
	1.03.06.2.01.		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Panjang Saluran Drainase dan Trotoar Jalan, (Satuan: persen)	287,65	20.200.000.000	57,73	-	62,73	11.769.554.700	0,00	32.817.180	0,00	153.624.140	0,00	153.624.140	0,00	24.358.845.395	0,00	120,59							
	1.03.06.2.01.01.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun, (Satuan: Dok)	2,00	200.000.000	-	-	1,00	69.856.440	0,00	6.233.480	1,00	69.856.440	1,00	69.856.440	1,00	69.856.440	50,00	34,93				BIDANG BINA MARGA			
	1.03.06.2.01.05.		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun, (Satuan: Meter)	5.000,00	20.000.000.000	-	-	7.300,00	83.767.700	0,00	26.583.700	0,00	83.767.700	0,00	83.767.700	0,00	83.767.700	0,00	0,42				BIDANG BINA MARGA			
	1.03.10.		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi Baik, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	60,00	2.542.328.602.523	55,71	123.362.088.759	59,00	100.987.576.500	0,00	1.286.108.040	0,00	13.360.944.758	0,00	13.360.944.758	55,71	205.180.976.434	92,85	8,07				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13		14=7+13		15=14/6 x100%		15
		1.03.10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Panjang Jalan Kabupaten yang di rehabilitasi / direkontruksi ditahun berjalan, (Satuan: persen)	37,56	899.741.775.500	10,30	-	8,51	100.387.576.500	0,00	1.286.108.040	0,00	13.360.944.758	0,00	13.360.944.758	0,00	205.180.976.434	0,00	22,80	
		1.03.10.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian, (Satuan: Dok)	16,00	7.998.200.000		-	6,00	737.364.600	0,00	31.167.400	1,00	170.056.200	1,00	170.056.200	1,00	170.056.200	6,25	2,13	BIDANG BINA MARGA
		1.03.10.2.01.02.	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan, (Satuan: M2)	55.200,00	66.000.000.000		-	55.200,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	BIDANG BINA MARGA
		1.03.10.2.01.03.	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan, (Satuan: Dok)	2,00	350.000.000		-	2,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	BIDANG BINA MARGA
		1.03.10.2.01.04.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan, (Satuan: Dok)	8,00	1.325.575.500		-	3,00	377.986.600	0,00	12.648.960	0,00	38.462.880	0,00	38.462.880	0,00	38.462.880	0,00	2,90	BIDANG BINA MARGA
		1.03.10.2.01.05.	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun, (Satuan: Km)	3,68	90.000.000.000		-	3,68	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	BIDANG BINA MARGA
		1.03.10.2.01.08.	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan, (Satuan: Km)	71,10	583.680.000.000		-	35,00	84.721.084.100	0,00	85.974.180	0,00	10.582.191.548	0,00	10.582.191.548	0,00	10.582.191.548	0,00	1,81	BIDANG BINA MARGA
		1.03.10.2.01.10.	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala, (Satuan: Km)	34,50	96.088.000.000		-	14,00	10.718.721.000	0,00	23.666.960	0,00	55.183.480	0,00	55.183.480	0,00	55.183.480	0,00	0,06	BIDANG BINA MARGA
		1.03.10.2.01.11.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin, (Satuan: Km)	500,00	16.500.000.000		-	40,00	2.823.219.000	0,00	1.132.650.540	67,96	2.514.579.050	67,96	2.514.579.050	67,96	2.514.579.050	13,59	15,24	BIDANG BINA MARGA
		1.03.10.2.01.12.	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun, (Satuan: Meter)	56,00	5.000.000.000		-	56,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	BIDANG BINA MARGA
		1.03.10.2.01.16.	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian, (Satuan: Meter)	250,00	30.000.000.000		-	6,00	1.000.000.000	0,00	-	0,00	441.600	0,00	441.600	0,00	441.600	0,00	0,00	BIDANG BINA MARGA

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13		14=7+13		15=14/6 x100%	15	
		1.03.10.2.01.18.	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi, (Satuan: Meter)	50,00	2.000.000.000		-	609.201.200	7,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	BIDANG BINA MARGA	
		1.03.10.2.01.19.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin, (Satuan: Meter)	3.000 ,00	800.000.000		-	-	3.000,0 0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	BIDANG BINA MARGA	
2	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA			Meningkatnya persentase Intensitas Tanam	85,67	1.155.566.945.334	88	41.148.633.793	30.404.973.900	86,33	33,33	1.269.757.240	62,66	10.062.031.970	62,6 6	10.062.031.970	88	81.160.252.547	101, 53	7,02	
	1.03.02.		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan Persentase Berkurangnya luasan genangan akibat banjir, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	40,78	1.155.566.945.334	39,27	41.148.633.793	30.404.973.900	39,42	0,00	1.269.757.240	0,00	10.062.031.970	0,00	10.062.031.970	39,27	81.160.252.547	96,3 0	7,02	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir, (Satuan: Prosen)	8,80	171.453.250.000	6,80	-	19.578.435.500	7,80	0,00	414.371.900	0,00	6.735.336.850	0,00	6.735.336.850	0,00	50.389.154.875	0,00	29,3 9	
		1.03.02.2.01.01.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun, (Satuan: Dok)	21,00	2.667.000.000		-	147.638.800	1,00	0,00	36.466.400	0,00	73.380.900	0,00	73.380.900	0,00	73.380.900	0,00	2,75	BIDANG SUMBER DAYA AIR
		1.03.02.2.01.06.	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun, (Satuan: Unit)	153,0 0	23.493.750.000		-	-	153,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	BIDANG SUMBER DAYA AIR	
		1.03.02.2.01.09.	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun, (Satuan: Km)	19,50	85.762.500.000		-	12.759.604.500	10,62	0,00	50.472.860	4,32	5.774.866.590	4,32	5.774.866.590	4,32	5.774.866.590	22,1 5	6,73	BIDANG SUMBER DAYA AIR
		1.03.02.2.01.21.	Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi, (Satuan: Unit)	9,00	10.237.500.000		-	-	9,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	BIDANG SUMBER DAYA AIR	
		1.03.02.2.01.24.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi, (Satuan: Km)	7,50	16.812.500.000		-	1.310.965.400	0,57	0,00	28.164.320	0,00	81.716.160	0,00	81.716.160	0,00	81.716.160	0,00	0,49	BIDANG SUMBER DAYA AIR

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13		14=7+13		15=14/6 x100%	15
		1.03.02.2.01.46.	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi, (Satuan: Km)	38.10	30.000.000.000	-	6.01	5.360.226.800	0,00	299.236.320	1.55	805.383.210	1.55	805.383.210	1.55	805.383.210	4.07	2.68	BIDANG SUMBER DAYA AIR
		1.03.02.2.01.49.	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara, (Satuan: Unit)	2,00	1.680.000.000	-	2,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	BIDANG SUMBER DAYA AIR
		1.03.02.2.01.61.	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota, (Satuan: Orang)	25,00	400.000.000	-	25,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	BIDANG SUMBER DAYA AIR
		1.03.02.2.01.63.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota, (Satuan: Orang)	25,00	400.000.000	-	25,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	BIDANG SUMBER DAYA AIR
		1.03.02.2.02.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dliayani oleh jaringan irigasi, (Satuan: Persen)	76,00	196.462.240.000	74,00	75,00	10.826.538.400	0,00	855.363.340	0,00	3.326.695.120	0,00	3.326.695.120	0,00	30.771.097.572	0,00	15,66	
		1.03.02.2.02.01.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun, (Satuan: Dok)	16,00	1.722.000.000	-	1,00	107.834.000	0,00	59.062.720	2,00	82.113.560	2,00	82.113.560	12,50	82.113.560	4,77		BIDANG SUMBER DAYA AIR
		1.03.02.2.02.03.	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun, (Satuan: Bendung)	5,00	11.562.500.000	-	5,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	BIDANG SUMBER DAYA AIR
		1.03.02.2.02.08.	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan, (Satuan: Km)	35,00	112.775.000.000	-	4.19	5.490.757.400	0,00	53.296.880	0,75	863.807.040	0,75	863.807.040	0,75	863.807.040	2.14	0.77	BIDANG SUMBER DAYA AIR
		1.03.02.2.02.09.	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan, (Satuan: Bendung)	4,00	28.800.000.000	-	4,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	BIDANG SUMBER DAYA AIR
		1.03.02.2.02.15.	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi, (Satuan: Bendung)	4,00	28.800.000.000	-	1,00	99.442.300	0,00	463.900	0,00	1.082.300	0,00	1.082.300	0,00	1.082.300	0,00	0,00	BIDANG SUMBER DAYA AIR

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13		14=7+13		15=14/6 x100%		15
		1.03.02.2.02.21.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara. (Satuan: Km)	5,22	12.358.740.000	-	0,35	5.128.504.700	0,00	742.559.840	0,00	2.379.692.220	0,00	2.379.692.220	0,00	2.379.692.220	0,00	19,26	BIDANG SUMBER DAYA AIR	
		1.03.02.2.02.28.	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Di Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air. (Satuan: Dl)	72,00	450.000.000	-	72,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	BIDANG SUMBER DAYA AIR	
3	Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang			Ketaatan terhadap RTRW (Prosen)	16,67	1.576.658.310	16,67	27,28	704.942.000	0	128.892.190	0	269.432.360	0	269.432.360	16,67	2.815.033.180	50,02	12,58		
	1.03.09.		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase pemenuhan dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, (Satuan: Prosen - Kumulatif Meningkat)	100,00	1.899.113.612	20,00	20,00	86.614.000	0,00	20.997.480	0,00	48.592.440	0,00	48.592.440	0,00	527.975.700	0,00	27,80	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.09.2.01.		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase dokumen sistem bangunan yang tersedia, (Satuan: Prosen)	100,00	500.000.000	-	100,00	86.614.000	0,00	20.997.480	0,00	48.592.440	0,00	48.592.440	0,00	527.975.700	0,00	105,60		
	1.03.09.2.01.01.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota. (Satuan: Dok)	1,00	500.000.000	-	1,00	86.614.000	0,00	20.997.480	0,00	48.592.440	0,00	48.592.440	0,00	48.592.440	0,00	9,72	BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG	
	1.03.12.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemenuhan dokumen rencana rinci tata ruang dan ketaatan pemanfaatan ruang. (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	82,56	20.469.177.408	72,09	77,91	618.328.000	0,00	107.894.710	0,00	220.839.920	0,00	220.839.920	72,09	2.287.057.480	87,32	11,17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.12.2.01.		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Prosentase tersedianya dokumen kebijakan perencanaan Tata Ruang, (Satuan: Prosen)	100,00	5.250.000.000	-	50,00	279.404.000	0,00	28.500.940	0,00	57.558.380	0,00	57.558.380	0,00	1.466.897.010	0,00	27,94		
	1.03.12.2.01.03.		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkadam selain RTRW Kabupaten/Kota. (Satuan: Dok)	103,00	5.000.000.000	-	103,00	279.404.000	0,00	28.500.940	0,00	57.558.380	0,00	57.558.380	0,00	57.558.380	0,00	1,15	BIDANG PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.01.04.		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang. (Satuan: Dok)	5,00	250.000.000	-	5,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	BIDANG PENATAAN RUANG	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13		14=7+13		15=14/6 x100%		15
		1.03.12.2.02.	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase aturan tata ruang yang tersosialisasikan, (Satuan: Prosen)	100,00	350.000.000		-	100,00	179.380.000	0,00	39.355.440	0,00	82.438.880	0,00	82.438.880	0,00	352.967.870	0,00	112,28	
		1.03.12.2.02.03.	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat, (Satuan: Dok)	1,00	350.000.000		-	1,00	179.380.000	0,00	39.355.440	0,00	82.438.880	0,00	82.438.880	0,00	82.438.880	0,00	23,55	BIDANG PENATAAN RUANG
		1.03.12.2.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, (Satuan: BA)	1,00	650.000.000	1,00	-	1,00	159.544.000	0,00	40.038.330	0,00	80.842.660	0,00	80.842.660	0,00	427.192.600	0,00	65,72	
				Prosentase tersedianya dokumen Pengawasan, (Satuan: Prosen)	100,00	650.000.000		-	100,00	159.544.000	0,00	40.038.330	0,00	80.842.660	0,00	80.842.660	0,00	427.192.600	0,00	65,72	
		1.03.12.2.04.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang, (Satuan: Dok)	206,00	650.000.000		-	206,00	159.544.000	0,00	40.038.330	0,00	80.842.660	0,00	80.842.660	0,00	80.842.660	0,00	12,44	BIDANG PENATAAN RUANG
4	Terciptyanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal			Persentase layanan informasi jasa konstruksi (Prosen)	100	7.151.306.104	70	786.268.080	85	439.696.000	0	23.934.880	0	231.576.140	0	231.576.140	70	1.141.463.640	0,00	70,06	
	1.03.11.		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persentase meningkatnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100,00	7.151.306.104	60,00	786.268.080	80,00	439.696.000	0,00	23.934.880	0,00	231.576.140	0,00	231.576.140	60,00	1.141.463.640	0,00	15,96	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/ analis operator yang memiliki sertifikat kompetensi, (Satuan: persen)	100,00	800.000.000	38,46	-	69,23	326.711.800	0,00	6.233.480	0,00	194.419.740	0,00	194.419.740	0,00	814.887.040	0,00	101,86	
	1.03.11.2.01.04.		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan, (Satuan: Orang)	240,00	400.000.000		-	80,00	159.817.300	0,00	-	80,00	144.042.200	80,00	144.042.200	80,00	144.042.200	33,33	36,01	BIDANG BINA KONSTRUKSI

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13		14=7+13		15=14/6 x100%	15	
		1.03.11.2.01.07.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi, (Satuan: Orang)	400,00	400.000.000		-	100,00	166.884.500	0,00	6.233.480	0,00	50.377.540	0,00	50.377.540	0,00	50.377.540	0,00	125 9	BIDANG BINA KONSTRUKS
		1.03.11.2.02.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir, (Satuan: Prosen)	100,00	500.000.000	100,00	-	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	160.657.200	0,00	321 3		
		1.03.11.2.02.01.	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi, (Satuan: Dok)	2,00	200.000.000		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		BIDANG BINA KONSTRUKS
		1.03.11.2.02.02.	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi, (Satuan: Dok)	1,00	100.000.000		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		BIDANG BINA KONSTRUKS
		1.03.11.2.02.03.	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI, (Satuan: Orang)	2,00	200.000.000		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		BIDANG BINA KONSTRUKS
		1.03.11.2.03.	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota, (Satuan: Dok)	75,00	200.000.000	75,00	-	75,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
		1.03.11.2.03.02.	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan, (Satuan: Dok)	50,00	200.000.000		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		BIDANG BINA KONSTRUKS
		1.03.11.2.04.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaannya konstruksi, (Satuan: prosen)	100,00	600.000.000	100,00	-	100,00	112.984.200	0,00	17.701.400	0,00	37.156.400	0,00	37.156.400	0,00	165.919.400	0,00	276 5	
		1.03.11.2.04.02.	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi, (Satuan: Orang)	100,00	400.000.000		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		BIDANG BINA KONSTRUKS

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13		14=7+13		15=14/6 x100%	15
		1.03.11.2.04.03.	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelolaan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelolaan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi, (Satuan: Dok)	2,00	200.000.000		-	2,00	112.984.200	0,00	17.701.400	0,00	37.156.400	0,00	37.156.400	0,00	37.156.400	18,58	BIDANG BINA KONSTRUKSI
5	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan			Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	75	274.501.838.808	68,92	28.437.601.243	73	39.350.025.734	73,70	5.263.772.076	0	15.121.442.167	73,7	15.121.442.167	73,7	52.781.958.193	98,27	
	1.03.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terperuhnya kebutuhan dasar operasional Dinas, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	100,00	274.501.838.808	100,00	28.437.601.243	100,00	39.350.025.734	25,71	5.263.772.076	41,02	15.121.442.167	41,02	15.121.442.167	100,00	52.781.958.193	100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Terperuhnya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Laporan Kinerja Dinas, (Satuan: Prosen)	100,00	107.500.000	100,00	-	100,00	102.015.900	13,89	31.153.620	25,00	56.678.360	25,00	56.678.360	25,00	158.833.410	147,75	
	1.03.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, (Satuan: Dok)	2,00	55.000.000		-	2,00	49.515.900	0,00	21.977.540	0,00	31.411.020	0,00	31.411.020	0,00	31.411.020	57,11	SEKRETARIA T DPUTR
	1.03.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, (Satuan: Laporan)	18,00	52.500.000		-	18,00	52.500.000	5,00	9.176.080	9,00	25.267.340	9,00	25.267.340	9,00	25.267.340	48,13	SEKRETARIA T DPUTR
	1.03.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Terperuhnya Dokumen Realisasi Anggaran Dinas, (Satuan: BA)	100,00	64.463.655.897	100,00	-	100,00	25.911.112.340	39,62	4.414.234.303	65,69	13.045.633.521	65,69	13.045.633.521	65,69	42.765.596.765	66,34	
	1.03.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, (Satuan: Orang Bulan)	2.951,00	64.463.655.897		-	2.951,00	25.860.888.940	187,00	4.403.001.023	187,00	13.018.915.281	187,00	13.018.915.281	187,00	13.018.915.281	6,34	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, (Satuan: Laporan)	1,00	5.000.000		-	1,00	4.999.800	1,00	4.999.800	1,00	4.999.800	1,00	4.999.800	1,00	4.999.800	100,00	SEKRETARIA T DPUTR

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13		14=7+13		15=14/6 x100%		15
		1.03.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD, (Satuan: Laporan)	10,00	52.500.000			10,00	45.213.600	3,00	6.233.480	6,00	21.718.440	6,00	21.718.440	6,00	21.718.440	60,0 0	41,3 7	SEKRETARI AT DPUPR
		1.03.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terjামinya Barang Milik Daerah, (Satuan: Prosen)	100,00	670.000.000	100,00		100,00	200.044.000	0,00	-	0,00	49.769.250	0,00	49.769.250	0,00	479.872.708	0,00	71,6 2	
		1.03.01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, (Satuan: Dok)	2,00	670.000.000			2,00	200.044.000	0,00	-	0,00	49.769.250	0,00	49.769.250	0,00	49.769.250	0,00	7,43	SEKRETARI AT DPUPR
		1.03.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Pegawai, (Satuan: Prosen)	100,00	150.000.000	100,00		100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	550.000	0,00	0,37	
		1.03.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan, (Satuan: Paket)	1,00	150.000.000			1,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	SEKRETARI AT DPUPR
		1.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penuhan Kebutuhan Administrasi Dinas, (Satuan: Prosen)	100,00	1.530.879.000	100,00		100,00	535.293.900	12,14	147.107.290	20,97	325.966.370	20,9 7	325.966.370	20,97	1.964.988.143	20,9 7	128, 36	
		1.03.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, (Satuan: Paket)	1,00	20.000.000			1,00	9.999.300	0,00	2.354.500	0,00	4.675.500	0,00	4.675.500	0,00	4.675.500	0,00	23,3 8	SEKRETARI AT DPUPR
		1.03.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, (Satuan: Paket)	1,00	750.000.000			1,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	SEKRETARI AT DPUPR
		1.03.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan, (Satuan: Paket)	1,00	25.000.000			1,00	9.999.900	0,00	3.251.400	0,00	5.700.200	0,00	5.700.200	0,00	5.700.200	0,00	22,8 0	SEKRETARI AT DPUPR
		1.03.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, (Satuan: Paket)	1,00	80.000.000			1,00	79.999.900	0,00	20.332.000	0,00	40.366.000	0,00	40.366.000	0,00	40.366.000	0,00	50,4 6	SEKRETARI AT DPUPR

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13		14=7+13		15=14/6 x100%	15
		1.03.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, (Satuan: Dok)	36,00	96.159.000		-	36,00	96.780.000	9,00	23.940.000	18,00	47.880.000	18,00	47.880.000	47.880.000	50,0 0	48,7 9	SEKRETARI AT DPUTR
		1.03.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, (Satuan: Paket)	1,00	159.720.000	-	-	1,00	151.241.800	0,00	39.247.600	0,00	80.389.200	0,00	80.389.200	80.389.200	0,00	50,3 3	SEKRETARI AT DPUTR
		1.03.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, (Satuan: Laporan)	12,00	25.000.000	-	-	12,00	5.000.000	3,00	1.200.000	5,00	2.200.000	5,00	2.200.000	2.200.000	41,6 7	8,80	SEKRETARI AT DPUTR
		1.03.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, (Satuan: Laporan)	120,00	325.000.000	-	-	120,00	148.287.500	42,00	49.966.050	89,00	127.544.250	89,00	127.544.250	127.544.250	74,1 7	39,2 4	SEKRETARI AT DPUTR
		1.03.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, (Satuan: Dok)	12.000,00	50.000.000	-	-	6.000,00	34.956.500	0,00	6.795.740	115,00	17.111.220	115,00	17.111.220	17.111.220	0,96	34,2 2	SEKRETARI AT DPUTR
		1.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bertambahnya Jumlah Peralatan dan Mesin, (Satuan: Unit)	150,00	15.032.299.000	114,00	-	132,00	9.447.141.000	0,00	11.665.000	0,00	11.665.000	0,00	11.665.000	1.343.331.650	0,00	8,94	
		1.03.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan, (Satuan: Unit)	5,00	833.149.000	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00	SEKRETARI AT DPUTR
		1.03.01.2.07.03.	Pengadaan Alat Besar yang	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan, (Satuan: Unit)	5,00	8.719.150.000	-	-	1,00	9.264.094.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00	SEKRETARI AT DPUTR
		1.03.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, (Satuan: Unit)	14,00	480.000.000	-	-	4,00	183.057.000	0,00	11.665.000	0,00	11.665.000	0,00	11.665.000	11.665.000	0,00	2,43	SEKRETARI AT DPUTR
		1.03.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan, (Satuan: Unit)	1,00	5.000.000.000	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00	SEKRETARI AT DPUTR
		1.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penunjang Operasional Dinas, (Satuan: Prosen)	100,00	530.000.000	100,00	-	100,00	529.387.344	16,67	123.234.773	50,00	245.784.796	50,00	245.784.796	845.233.415	50,0 0	159, 48	
		1.03.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, (Satuan: Laporan)	36,00	530.000.000	-	-	36,00	529.387.344	9,00	123.234.773	18,00	245.784.796	18,00	245.784.796	245.784.796	50,0 0	46,3 7	SEKRETARI AT DPUTR

1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		13		14=7+13		15=14/6 x100%		15	
		1.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Peningkatan Layanan SPAM Sambungan Rumah di Tahun n, (Satuan: Prosen)	0,76	4.429.300.000	-	0,38	2.625.041.250	0,00	536.377.090	0,00	1.386.044.870	0,00	1.386.044.870	0,00	5.223.552.102	0,00	117,93		
		1.03.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, (Satuan: Unit)	176,00	789.792.000	-	146,00	767.983.500	438,00	187.266.000	873,00	372.970.000	873,00	372.970.000	873,00	372.970.000	490,45	47,22	SEKRETARI AT DPUTR	
		1.03.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, (Satuan: Unit)	165,00	107.300.000	-	154,00	67.984.100	29,00	19.779.600	81,00	37.604.400	81,00	37.604.400	81,00	37.604.400	49,09	35,05	SEKRETARI AT DPUTR	
		1.03.01.2.09.03.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya, (Satuan: unit)	35,00	950.000.000	-	12,00	560.915.100	0,00	101.142.360	17,00	417.422.180	17,00	417.422.180	17,00	417.422.180	48,57	43,94	SEKRETARI AT DPUTR	
		1.03.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, (Satuan: Unit)	17,00	307.000.000	-	13,00	175.961.650	13,00	50.498.410	13,00	133.496.130	13,00	133.496.130	13,00	133.496.130	76,47	43,48	SEKRETARI AT DPUTR	
		1.03.01.2.09.07.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara, (Satuan: Unit)	230,00	65.000.000	-	91,00	62.790.000	22,00	15.180.000	45,00	31.050.000	45,00	31.050.000	45,00	31.050.000	19,57	47,77	SEKRETARI AT DPUTR	
		1.03.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, (Satuan: Unit)	17,00	2.145.208.000	-	17,00	924.746.900	11,00	147.868.720	12,00	360.562.160	12,00	360.562.160	12,00	360.562.160	70,59	16,81	SEKRETARI AT DPUTR	
		1.03.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit Dipelihara/Direhabilitasi, (Satuan: Unit)	183,00	65.000.000	-	106,00	64.660.000	24,00	14.640.000	50,00	32.940.000	50,00	32.940.000	50,00	32.940.000	27,32	50,68	SEKRETARI AT DPUTR	
6	Meningkatnya Kualitas pelayanan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung			Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	64,01	2.473.594.020.590	47,93	48.445.172.875	63,72	19.278.054.100	0	290.399.160	0	5.007.195.510	0	5.007.195.510	47,93	66.033.798.004	74,88	2,67	
		1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	73,00	338.070.778.810	100,02	10.715.084.789	72,34	791.611.200	0,00	38.020.600	0,00	137.766.800	0,00	137.766.800	100,02	13.317.637.479	137,01	3,93	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13		14=7+13		15=14/6 x100%		15
		1.03.03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Layanan SPAM Sambungan Rumah di Tahun n, (Satuan: Prosen)	0.76	112.200.000.000		-	0.38	791.611.200	0,00	38.020.600	0,00	137.766.800	0,00	137.766.800	0,00	13.317.637.479	0,00	11.87	
		1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun, (Satuan: Dok)	1,00	150.000.000		-	2,00	143.529.200	0,00	8.957.140	1,00	21.479.220	1,00	21.479.220	1,00	21.479.220	100,00	14,32	BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMA N
		1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/ Optimalisasi SPAM, (Satuan: Dok)	37,00	300.000.000		-	1,00	148.541.300	0,00	16.044.480	1,00	78.893.140	1,00	78.893.140	1,00	78.893.140	27,00	26,30	BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMA N
		1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat, (Satuan: SR)	880,00	76.000.000.000		-	880,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMA N
		1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu, (Satuan: Liter/Detik)	20,29	21.750.000.000		-	20,29	299.540.700	0,00	12.018.980	0,00	33.394.440	0,00	33.394.440	0,00	33.394.440	0,00	0,15	BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMA N
		1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat, (Satuan: SR)	2.051,00	14.000.000.000		-	500,00	200.000.000	0,00	1.000.000	0,00	4.000.000	0,00	4.000.000	0,00	4.000.000	0,00	0,03	BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMA N
		1.03.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Prosentase bangunan Penampung Sampah Yang Terbangun, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100,00	193.097.226.400	0.48	21.992.585.166	99.52	5.993.184.500	0,00	2.992.200	0,00	160.440.600	0,00	160.440.600	0.48	25.556.831.053	0.4	13,24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.04.2.01.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Bangunan Penampungan Sampah di tahun n, (Satuan: Prosen)	100,00	80.000.000.000		-	75,00	5.993.184.500	0,00	2.992.200	0,00	160.440.600	0,00	160.440.600	0,00	25.556.831.053	0,00	31,95	
		1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, (Satuan: Rumah Tangga)	459.400,00	80.000.000.000		-	459.400,00	5.993.184.500	0,00	2.992.200	0,00	160.440.600	0,00	160.440.600	0,00	160.440.600	0,00	0,02	BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMA N
		1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	prosentase cakupan akses air limbah domestik, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	81,06	413.221.389.510	89.22	6.940.220.240	81.04	525.884.200	0,00	65.220.640	0,00	3.262.208.320	0,00	3.262.208.320	89.22	10.318.599.720	110,07	2,50	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13		14=7+13		15=14/6 x100%	15
		1.03.05.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Layanan SPALD Rumah Tangga di Tahun n, (Satuan: Prosen)	100,00	154.950.000.000	-	50,66	525.884.200	0,00	65.220.640	0,00	3.262.208.320	0,00	3.262.208.320	0,00	10.318.589.720	0,00	6,66	
		1.03.05.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun, (Satuan: Dok)	15,00	350.000.000	-	10,00	56.031.300	0,00	11.765.480	0,00	30.466.940	0,00	30.466.940	0,00	30.466.940	0,00	8,70	BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN
		1.03.05.2.01.04.	Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota, (Satuan: RT)	8.000,00	85.400.000.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN
		1.03.05.2.01.05.	Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman, (Satuan: RT)	607,690,00	69.000.000.000	-	130,00	469.852.900	0,00	53.455.160	418,00	3.231.741.380	418,00	3.231.741.380	418,00	3.231.741.380	0,07	4,68	BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN
		1.03.05.2.01.11.	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman, (Satuan: Dok)	1,00	200.000.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN
		1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	2,00	1.528.204.625.870	2,00	8.797.282.680	11.967.374.200	0,00	184.165.720	0,00	1.446.779.790	0,00	1.446.779.790	0,00	18.840.739.752	100,00	1,10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		1.03.08.2.01.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Prosentase Layanan PBG yang terlayani, (Satuan: Prosen)	100,00	506.310.000.000	-	100,00	11.967.374.200	0,00	184.165.720	0,00	1.446.779.790	0,00	1.446.779.790	0,00	16.840.739.752	0,00	3,33	
		1.03.08.2.01.01.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG, (Satuan: Dok)	110,00	1.380.000.000	-	100,00	545.697.000	0,00	137.960.800	0,00	289.292.900	0,00	289.292.900	0,00	289.292.900	0,00	20,96	BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG

1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		13		14=7+13		15=14/6 x100%	15	
		1.03.08.2.01.02.	Perencanaan, Pembangunan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota, (Satuan: Dok)	10,00	3.630.000.000		-	1,00	275.000.000	0,00	-	0,00	272.849.100	0,00	272.849.100	0,00	0,00	7,52	BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG
		1.03.08.2.01.04.	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota, (Satuan: Dok)	8,00	1.000.000.000		-	10,00	55.908.600	0,00	11.398.740	0,00	27.122.620	0,00	27.122.620	0,00	0,00	2,71	BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG
		1.03.08.2.01.05.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota, (Satuan: Dok)	1,00	300.000.000		-	1,00	85.074.600	0,00	15.572.480	0,00	40.224.070	0,00	40.224.070	0,00	0,00	13,41	BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG
		1.03.08.2.01.12.	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahtsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahtsui, (Satuan: Unit)	10,00	500.000.000.000		-	50,00	11.004.694.000	0,00	19.233.700	0,00	817.291.100	0,00	817.291.100	0,00	0,00	0,16	BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG

2.2. Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam IKK, SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dapat terlihat pada tabel pada halaman berikutnya :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Tahun 2023 s.d Semester I

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	-	-	83%	84%	85%	86,00%	83,32%	83,73%	0%	84,00%	84,50%		
2	Intensitas Tanam	-	-	253%	85,67%	86%	86,33%	256,00%	88,00%	69%	88,33%	88,60%		
3	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kab beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	-	-	5,56%	11,11%	16,67%	27,78%	5,56%	11,11%	0%	16,67%	27,78%		
4	Persentase layanan informasi jasa konstruksi infrastruktur pekerjaan umum	-	-	40%	55%	70%	85%	40,00%	55,00%	0%	70,00%	85,00%		
5	Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	-	-	0	37,90%	63,18%	63,72%	0,00%	37,80%	0%	38,00%	39,00%		
6	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	-	-	68,50	68,50	71,50	83	62,67	63,73	0%	68,92	70		
7	-	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	-	0	70,59%	71,66%	72,34%	0,00%	70,79%	0%	71,66%	72,34%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	-	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	0	78%	81%	81,04%	0,00%	79,60%	0%	81,00%	81,04%	
9			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0	5,80%	6,80%	7,80%	4,72%	6,77%	0%	6,80%	7,80%	
10			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0	5,80%	6,80%	7,80%	4,72%	6,77%	0%	6,80%	7,80%	
11			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0	73%	74%	75%	72,15%	63,18%	0%	74,00%	75,00%	
12			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	0	70,59%	71,66%	72,34%	0,00%	70,79%	0%	71,66%	72,34%	
13			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0%	78%	81%	81%	0,00%	79,60%	0%	81,00%	81,04%	
14			Rasio kepatuhan IMB kab/kota	0%	0%	0%	0%	0,00%	100,00%	0%	100,00%	100,00%	
15			Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/ kota	83%	84%	85%	86,00%	83,32%	83,73%	0%	84,00%	84,50%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16			Rasio tenaga operator/teknisi/ analisiss yang memiliki sertifikat kompetensi	0,00%	7,69%	38,46%	69,23%	20%	22,31%		38,46%	69,23%	
17			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%		100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan Dinas Teknis yang peranannya sangat penting sebagai perumus pelaksana kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dimana Infrastruktur Pekerjaan Umum sangat menunjang perekonomian masyarakat, dan banyak masukan yang sangat tinggi terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengenai penanganan Infrastruktur serta perlunya penambahan peralatan alat-alat berat dan alat laboratorium.

2.4. Review terhadap rancangan Perubahan Rencana Kerja

Renja murni tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan perubahan renja tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Perbandingan antaran rancangan Renja Murni 2023 dengan Rancangan Awal Perubahan Renja Tahun 2023 dapat terlihat pada table pada halaman berikutnya :

Review Perubahan Renja terhadap Renja Murni Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon

Rencana Tahun 2023										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhi nya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Laporan Kinerja Dinas		100 Persen	100 Persen	102.015.900	102.015.900	-		
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Cirebon	2 Dok	2 Dok	49.515.900	49.515.900	-	PIS	PIS
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Cirebon	18 Laporan	18 Laporan	52.500.000	52.500.000	-	PIS	PIS
1.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhi nya Dokumen Realisasi Anggaran Dinas		100 BA	100 BA	27.240.173.300	26.158.937.340	(1.081.237.960)		
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	2.951 Orang Bulan	2.951 Orang Bulan	27.189.961.900	26.108.723.940	(1.081.237.960)	PIS	PIS
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Laporan	1 Laporan	4.999.800	4.999.800	-	PIS	PIS
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kabupaten Cirebon	10 Laporan	10 Laporan	45.213.600	45.213.600	-	PIS	PIS

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
1.03.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terjainya Barang Milik Daerah		100 Persen	100 Persen	200.044.000	200.044.000	-		
1.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Cirebon	2 Dok	1 Dok	200.044.000	200.044.000	-	PIS	PIS
1.03.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Pegawai		100 Persen	100 Persen	-	-	-		
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Cirebon	1 Paket	1 Paket	-	-	-		
1.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Dinas		100 Persen	100 Persen	535.283.900	685.597.400	150.313.500		
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Paket	1 Paket	9.999.300	9.999.300	-	PIS	PIS
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Paket	1 Paket	-	-	-		
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Paket	1 Paket	9.999.800	9.999.800	-	PIS	PIS
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Paket	1 Paket	79.999.900	79.999.900	-	PIS	PIS
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	36 Dok	36 Dok	95.760.000	95.760.000	-	PIS	PIS
1.03.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Paket	1 Paket	151.241.800	151.241.800	-	PIS	PIS
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Cirebon	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	-	PIS	PIS
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Cirebon	120 Laporan	89 Laporan	148.287.500	298.601.000	150.313.500	PIS	PIS
1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Cirebon	6.000 Dok	466 Dok	34.995.600	34.995.600	-	PIS	PIS
1.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bertambahnya Jumlah Peralatan dan Mesin		132 Unit	132 Unit	4.894.257.000	9.275.749.000	4.381.492.000		
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	0 Unit	0 Unit	-	-	-		
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Unit	13 Unit	4.711.200.000	9.264.084.000	4.552.884.000	PIS	PIS
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	4 Unit	5 Unit	183.057.000	11.665.000	(171.392.000)	PIS	PIS

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
1.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	0 Unit	0 Unit	-	-	-	-	-
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya Penunjang Operasional Dinas		100 Persen	100 Persen	529.387.344	679.386.928	149.999.584		
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	36 Laporan	36 Laporan	529.387.344	679.386.928	149.999.584	PIS	PIS
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Peningkatan Layanan SPAM Sambungan Rumah di Tahun n		0,38 Persen	0,38 Persen	2.443.060.250	2.740.119.750	297.059.500		
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Cirebon	146 Unit	146 Unit	767.992.000	767.983.500	(8.500)	PIS	PIS
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Cirebon	154 Unit	154 Unit	67.989.500	67.984.100	(5.400)	PIS	PIS
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kabupaten Cirebon	12 unit	17 unit	560.915.100	675.993.600	115.078.500	PIS	PIS
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Cirebon	13 Unit	13 Unit	175.961.650	175.961.650	-	PIS	PIS
1.03.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Cirebon	91 Unit	91 Unit	62.790.000	62.790.000	-	PIS	PIS
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Cirebon	17 Unit	17 Unit	742.752.000	924.746.900	181.994.900	PIS	PIS
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Cirebon	106 Unit	106 Unit	64.660.000	64.660.000	-	PIS	PIS
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan Persentase Berkurangnya luasan genangan akibat banjir		39,42 Persen	39,42 Persen	156.678.123.900	59.938.773.700	(96.739.350.200)		
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir		7,8 Persen	7,8 Persen	90.978.435.500	28.019.435.500	(62.959.000.000)		
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Kabupaten Cirebon	1 Dok	1 Dok	147.638.800	472.638.800	325.000.000	PIS	PIS
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Kabupaten Cirebon	153 Unit	153 Unit	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Kabupaten Cirebon	10,62 Km	5,86 Km	82.759.604.500	17.344.604.500	(65.415.000.000)	PIK, PIS, Pokir DPRD	PIK, PIS, Pokir DPRD
1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Kabupaten Cirebon	9 Unit	9 Unit	-	-	-		
1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Kabupaten Cirebon	0,57 Km	0,39 Km	3.410.965.400	2.655.965.400	(755.000.000)	PIK, PIS, Pokir DPRD	PIK, PIS, Pokir DPRD
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	Kabupaten Cirebon	6,01 Km	26,1 Km	4.660.226.800	7.546.226.800	2.886.000.000	PIK, PIS, Pokir DPRD	PIK, PIS, Pokir DPRD
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kabupaten Cirebon	2 Unit	2 Unit	-	-	-		
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	25 Orang	25 Orang	-	-	-		
1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	25 Orang	25 Orang	-	-	-		
1.03.02.2.02.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		75 Persen	75 Persen	65.699.688.400	31.919.338.200	(33.780.350.200)		
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Kabupaten Cirebon	1 Dok	2 Dok	107.834.000	527.834.000	420.000.000	DAK, PIS	DAK, PIS
1.03.02.2.02.03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Kabupaten Cirebon	5 Bendung	5 Bendung	750.000.000	-	(750.000.000)	Banprov	
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kabupaten Cirebon	4,19 Km	10,12 Km	59.613.907.400	24.163.557.200	(35.450.350.200)	DAK, PIS, Pokir DPRD	DAK, PIS, Pokir DPRD
1.03.02.2.02.09	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	Kabupaten Cirebon	4 Bendung	4 Bendung	-	-	-		
1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Kabupaten Cirebon	1 Bendung	1 Bendung	99.442.300	99.442.300	-	PIK	PIK
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kabupaten Cirebon	0,35 Km	12,27 Km	5.128.504.700	7.128.504.700	2.000.000.000	PIK, PIS, Pokir DPRD	PIK, PIS, Pokir DPRD
1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola DI Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Kabupaten Cirebon	72 DI	72 DI	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum		72,34 Persen	72,34 Persen	58.691.611.200	12.184.356.200	(46.507.255.000)		
1.03.03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Layanan SPAM Sambungan Rumah di Tahun n		0,38 Persen	0,38 Persen	58.691.611.200	12.184.356.200	(46.507.255.000)		
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Kabupaten Cirebon	2 Dok	1 Dok	143.529.200	143.529.200	-	PIS	PIS
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/ Optimalisasi SPAM	Kabupaten Cirebon	1 Dok	1 Dok	148.541.300	148.541.300	-	PIS	PIS
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat		880 SR	1.612 SR	57.900.000.000	11.392.745.000	(46.507.255.000)	DAK	DAK
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkolaan atau SPAM Tematik Tertentu	Kabupaten Cirebon	20,29 Liter/Detik	20,29 Liter/Detik	299.540.700	299.540.700	-	PIS	PIS
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Kabupaten Cirebon	500 SR	0 SR	200.000.000	200.000.000	-	Pokir DPRD	Pokir DPRD
1.03.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Prosentase bangunan Penampung Sampah Yang Terbangun		99,52 Persen	99,52 Persen	21.176.184.500	11.393.184.500	(9.783.000.000)		
1.03.04.2.01.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Bangunan Penampungan Sampah di tahun n		75 Persen	75 Persen	21.176.184.500	11.393.184.500	(9.783.000.000)		
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		459.400 Rumah Tangga	459.400 Rumah Tangga	21.176.184.500	11.393.184.500	(9.783.000.000)	Banprov, DAK, PIS	Banprov, DAK, PIS
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	prosentase cakupan akses air limbah domestik		81,04 Persen	81,04 Persen	57.025.884.200	13.071.140.700	(43.954.743.500)		
1.03.05.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Layanan SPALD Rumah Tangga di Tahun n		50,66 Persen	50,66 Persen	57.025.884.200	13.071.140.700	(43.954.743.500)		
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Kabupaten Cirebon	10 Dok	1 Dok	56.031.300	56.031.300	-	PIS	PIS
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	Kabupaten Cirebon	0 RT	0 RT	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Kabupaten Cirebon	130 RT	1.550 RT	56.969.852.900	13.015.109.400	(43.954.743.500)	DAK, PIS	DAK, PIS
1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Kabupaten Cirebon	0 Dok	0 Dok	-	-	-		
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air		4,57 Persen	4,57 Persen	11.469.554.752	14.184.554.700	2.714.999.948		
1.03.06.2.01.	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Panjang Saluran Drainase dan Trotoar Jalan		62,73 Persen	62,73 Persen	14.184.554.700	14.184.554.700	2.714.999.948		
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Kabupaten Cirebon	1 Dok	1 Dok	98.142.900	98.142.900	-	PIS	PIS
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Kabupaten Cirebon	7.300 Meter	6.180 Meter	11.371.411.852	14.086.411.800	2.714.999.948	PIK, PIS, Pokir DPRD	PIK, PIS, Pokir DPRD
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan		2 Persen	2 Persen	6.802.239.200	14.307.220.200	7.504.981.000		
1.03.08.2.01.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Prosentase Layanan PBG yang terlayani		100 Persen	100 Persen	6.802.239.200	14.307.220.200	7.504.981.000		
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kabupaten Cirebon	100 Dok	100 Dok	240.521.400	585.543.000	345.021.600	PIS	PIS
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	1 Dok	9 Dok	100.903.600	845.000.000	744.096.400	PIS	PIS
1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung	10 Dok	10 Dok	56.908.600	56.908.600	-	PIS	PIS
1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	1 Dok	1 Dok	85.074.600	85.074.600	-	PIS	PIS

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahtsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahtsui	Kabupaten Cirebon	50 Unit	51 Unit	6.318.831.000	12.734.694.000	6.415.863.000	PIS	PIS, DID
1.03.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase pemenuhan dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan		20 Persen	20 Persen	86.614.000	86.614.000	-		
1.03.09.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase dokumen sistem bangunan yang tersedia		100 Persen	100 Persen	86.614.000	86.614.000	-		
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		1 Dok	1 Dok	86.614.000	86.614.000	-	PIS	PIS
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi Baik		59 Persen	59 Persen	89.287.576.500	117.494.576.500	28.207.000.000		
1.03.10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Panjang Jalan Kabupaten yang di rehabilitasi / direkonstruksi ditahun berjalan		8,51 Persen	8,51 Persen	89.287.576.500	117.494.576.500	28.207.000.000		
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Kabupaten Cirebon	6 Dok	6 Dok	737.364.600	887.364.600	150.000.000	PIS	PIS
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan		55.200 M2	55.200 M2	-	-	-		
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Kabupaten Cirebon	2 Dok	2 Dok	-	-	-		
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Kabupaten Cirebon	3 Dok	3 Dok	377.986.600	377.986.600	-	PIS	PIS
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	Kabupaten Cirebon	3,68 Km	3,68 Km	-	-	-		
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Kabupaten Cirebon	35 Km	26,24 Km	75.021.084.100	92.562.084.100	17.541.000.000	PIK, PIS, Pokir DPRD, DID	PIK, PIS, Pokir DPRD, DID
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Kabupaten Cirebon	14 Km	17,29 Km	10.718.721.000	15.733.721.000	5.015.000.000	PIK, PIS, Pokir DPRD	PIK, PIS, Pokir DPRD
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Kabupaten Cirebon	40 Km	120 Km	1.323.219.000	5.823.219.000	4.500.000.000	PIS	PIS
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Kabupaten Cirebon	56 Meter	56 Meter	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	Kabupaten Cirebon	6 Meter	6 Meter	500.000.000	1.501.000.000	1.001.000.000	PIS	PIS
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Kabupaten Cirebon	7 Meter	7 Meter	609.201.200	609.201.200	-	PIK, PIS, Pokir DPRD	PIK, PIS, Pokir DPRD
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Kabupaten Cirebon	3.000 Meter	3.000 Meter	-	-	-	-	-
1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persentase meningkatnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi		80 Persen	80 Persen	439.696.000	439.696.000	-	-	-
1.03.11.2.01.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisiss yang memiliki sertifikat kompetensi		69,23 Persen	69,23 Persen	326.711.800	326.711.800	-	-	-
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Kabupaten Cirebon	80 Orang	80 Orang	159.817.300	159.817.300	-	PIS	PIS
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kabupaten Cirebon	100 Orang	100 Orang	166.894.500	166.894.500	-	PIS	PIS
1.03.11.2.02.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/kota	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		100 Persen	100 Persen	-	-	-	-	-
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Kabupaten Cirebon	0 Dok	0 Dok	-	-	-	-	-
1.03.11.2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kabupaten Cirebon	0 Dok	0 Dok	-	-	-	-	-
1.03.11.2.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Kabupaten Cirebon	0 Orang	0 Orang	-	-	-	-	-
1.03.11.2.03.	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		75 Dok	75 Dok	-	-	-	-	-
1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan	Kabupaten Cirebon	0 Dok	0 Dok	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
1.03.11.2.04.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		100 Persen	100 Persen	112.984.200	112.984.200	-		
1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kabupaten Cirebon	0 Orang	0 Orang	-	-	-		
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kabupaten Cirebon	2 Dok	2 Dok	112.984.200	112.984.200	-	PIS	PIS
1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase pemenuhan dokumen rencana rinci tata ruang dan ketaatan pemanfaatan ruang		77,91 Persen	77,91 Persen	618.328.000	968.328.000	350.000.000		
1.03.12.2.01.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Prosentase tersedianya dokumen kebijakan perencanaan Tata Ruang		50 Persen	50 Persen	279.404.000	629.404.000	350.000.000		
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkadam selain RTRW Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	103 Dok	103 Dok	279.404.000	629.404.000	350.000.000	PIS	PIS
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Kabupaten Cirebon	5 Dok	5 Dok	-	-	-		
1.03.12.2.02.	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase aturan tata ruang yang tersosialisasikan		100 Persen	100 Persen	179.380.000	179.380.000	-		
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kabupaten Cirebon	1 Dok	1 Dok	179.380.000	179.380.000	-	PIS	PIS
1.03.12.2.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1 BA	1 BA					
		Prosentase tersedianya dokumen Pengawasan		100 Persen	100 Persen	159.544.000	159.544.000	-		
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kabupaten Cirebon	206 Dok	206 Dok	159.544.000	159.544.000	-	PIS	PIS
J U M L A H						438.220.035.946	283.910.294.818	(158.207.367.752)		

A. Pendapatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pada Perubahan Anggaran Tahun 2023 tidak mengalami perubahan dengan menargetkan Pendapatan sebesar Rp514.799.182 (lima ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel II.5
Rencana Perubahan Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode Rekening	Uraian	2022		
		Murni	Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH	514.799.182	514.799.182	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	514.799.182	514.799.182	-
4.1.02.	Retribusi Daerah	506.799.182	506.799.182	-
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	506.799.182	506.799.182	-
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	506.799.182	506.799.182	-
4.1.02.02.01.0002.	Retribusi Penyewaan Tanah	66.620.000	66.620.000	-
4.1.02.02.01.0004.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	166.059.182	166.059.182	-
4.1.02.02.01.0006.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	274.120.000	274.120.000	-
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	8.000.000	8.000.000	-
4.1.04.01.05.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	8.000.000	8.000.000	-
4.1.04.01.05.0005.	Hasil Penjualan Tanaman	8.000.000	8.000.000	-
	Hasil Penebangan Pohon	8.000.000	8.000.000	-

BAB III.
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan berupaya mensinkronkan dengan kebijakan nasional dan provinsi yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan telahaan Kebijakan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Kebijakan :
 - a. Penanganan Jaringan Irigasi melalui Peningkatan kondisi Jaringan Irigasi dan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b. Penanganan Saluran Pembuang/Sungai/Kali melalui Pembangunan, Rehabilitasi Tanggul Sungai dan Normalisasi.
2. Penyelenggaraan Jalan dengan kebijakan :
 - a. Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan melalui Peningkatan, Pemeliharaan Berkala dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan;
 - b. Mengoptimalkan keberfungsian Bangunan Pelengkap Jalan melalui Pembangunan Saluran, Senderan dan Trotoar Jalan;
 - c. Peningkatan Kapasitas atau Konektifitas Jaringan Jalan melalui Pengadaan Lahan, Pembangunan Jalan Baru dan Pelebaran Jalan.
3. Pelayanan Akses Air Minum dengan kebijakan :

Peningkatan akses Air minum melalui Pembangunan dan Peningkatan Jaringan perpipaan.
4. Pelayanan Akses Sanitasi dengan kebijakan :

Peningkatan akses Sanitasi melalui Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Pengolahan air limbah baik komunal maupun individual.
5. Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan kebijakan :

Penguatan pada penyelesaian Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Kepala Daerah Rencan detail tata ruang dan peningkatan pada pengawasan pemanfaatan ruang.
6. Layanan Pembinaan Jasa Konstruksi dengan kebijakan :
 - a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
 - b. Peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi melalui pengawasan dan sosialisai aturan jasa konstruksi.

7. Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas layanan PBG melalui optimalisasi dukungan TABG, pengkaji teknis dan SIM BG;
- b. Peningkatan Pendataan Bangunan Gedung milik pemerintah daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja

Dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdapat beberapa kegiatan yang belum terakomodir dan perubahan target kinerja dalam perencanaan murni sehingga perlu dilakukan adanya perubahan Rencana Kerja Tahun 2023. Tujuan dari Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan capaian pembangunan yang telah ditargetkan dalam dokumen Renstra SKPD;
2. Peningkatan Kondisi Infrastruktur Jaringan Jalan, Sumber Daya Air dan Sanitasi, SPAM dan Bangunan Gedung;
3. Peningkatan Layanan Kepada Masyarakat pada Bidang Bangunan Gedung dan Penataan Ruang;
4. Peningkatan Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.

Sasaran dari Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Teknis Jaringan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jalan;
2. Perencanaan Teknis Sumber Air dan Irigasi, Pembangunan Tanggul Sungai, Normalisasi Sungai Peningkatan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Irigasi dan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi ;
3. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM dan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
4. Pembangunan TPS3R;
5. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
6. Perencanaan Teknis Sistem Drainase Jalan dan Pembangunan sistem drainase Jalan
7. Perencanaan Tata Ruang;
8. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

3.3. Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon menetapkan program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan tahun 2022 sebagai berikut :

1. Melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah melalui 1 (satu) Program, dengan 7 (tujuh) Kegiatan dan dijabarkan melalui 25 (dua puluh lima) Sub. Kegiatan dengan rencana anggaran perubahan Sebesar Rp40.497.898.434 (empat puluh milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
2. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dengan dijabarkan melalui 39 (tiga puluh sembilan) Sub. Kegiatan. Kegiatan dengan rencana anggaran perubahan sebesar Rp249.270.857.262 (dua ratus empat puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

Adapun rincian penambahan dan pergeseran anggaran pada Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan dapat terlihat pada tabel pada halaman berikutnya :

Rancangan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Perubahan Rencana Tahun 2023					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)
0.	NON URUSAN					39.350.025.734	40.497.898.434	
0.00.	NON BIDANG URUSAN					39.350.025.734	40.497.898.434	
1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Kebutuhan dasar operasional Dinas		100 Persen	100 Persen	39.350.025.734	40.497.898.434	1.147.872.700
1.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Laporan Kinerja Dinas		100 Persen	100 Persen	102.015.900	102.015.900	-
1.03.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Cirebon	2 Dok	2 Dok	49.515.900	49.515.900	-
1.03.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Cirebon	18 Laporan	18 Laporan	52.500.000	52.500.000	-
1.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhinya Dokumen Realisasi Anggaran Dinas		100 BA	100 BA	25.911.112.340	26.013.927.340	102.815.000
1.03.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	2.951 Orang	2.951 Orang	25.860.898.940	25.963.713.940	102.815.000
1.03.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Laporan	1 Laporan	4.999.800	4.999.800	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)
1.03.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kabupaten Cirebon	10 Laporan	10 Laporan	45.213.600	45.213.600	-
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terjeminya Barang Milik Daerah		100 Persen	0 Persen	-	-	-
01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Cirebon	2 Dok	0	-	-	
1.03.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Pegawai		100 Persen	100 Persen	200.044.000	200.044.000	-
1.03.01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Cirebon	2 Dok	1 Dok	200.044.000	200.044.000	-
1.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Dinas		100 Persen	100 Persen	535.283.900	1.150.601.500	615.317.600
1.03.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Paket	1 Paket	9.999.300	9.999.300	-
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Paket	3 Paket	-	389.591.000	389.591.000
1.03.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Paket	1 Paket	9.999.800	19.482.900	9.483.100
1.03.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Paket	1 Paket	79.999.900	96.243.400	16.243.500
1.03.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	36 Dok	36 Dok	95.760.000	95.760.000	-
1.03.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Paket	1 Paket	151.241.800	151.241.800	-
1.03.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Cirebon	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)
1.03.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Cirebon	120 Laporan	89 Laporan	148.287.500	348.287.500	200.000.000
1.03.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Cirebon	6.000 Dok	466 Dok	34.995.600	34.995.600	-
1.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bertambahnya Jumlah Peralatan dan Mesin		132 Unit	132 Unit	9.447.141.000	9.447.141.000	-
0.00.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	0 Unit	0 Unit	-	-	-
1.03.01.2.07.03.	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Unit	13 Unit	9.264.084.000	9.264.084.000	-
1.03.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	4 Unit	5 Unit	183.057.000	183.057.000	-
0.00.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	kabupaten Cirebon	0 Unit	0 Unit	-	-	-
1.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi nya Penunjang Operasional Dinas		100 Persen	100 Persen	529.387.344	674.408.944	145.021.600
1.03.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	36 Laporan	36 Laporan	529.387.344	674.408.944	145.021.600
1.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Peningkatan Layanan SPAM Sambungan Rumah di Tahun n		0,38 Persen	0,38 Persen	2.625.041.250	2.909.759.750	284.718.500
1.03.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Cirebon	146 Unit	146 Unit	767.983.500	777.983.500	10.000.000
1.03.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Cirebon	154 Unit	154 Unit	67.984.100	67.984.100	-
1.03.01.2.09.03.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kabupaten Cirebon	12 unit	17 Unit	560.915.100	775.633.600	214.718.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)
1.03.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Cirebon	13 Unit	13 Unit	175.961.650	175.961.650	-
1.03.01.2.09.07.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Cirebon	91 Unit	91 Unit	62.790.000	62.790.000	-
1.03.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Cirebon	17 Unit	17 Unit	924.746.900	984.746.900	60.000.000
1.03.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Cirebon	106 Unit	106 Unit	64.660.000	64.660.000	-
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					163.584.797.200	249.270.857.262	85.686.060.062
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					163.584.797.200	249.270.857.262	85.686.060.062
1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan Persentase Berkurangnya luasan genangan akibat banjir		39,42 Persen	39,42 Persen	30.404.973.900	57.245.470.500	26.840.496.600
1.03.02.2.01.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir		7,8 Persen	7,8 Persen	19.578.435.500	26.219.132.300	6.640.696.800
1.03.02.2.01.01.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Kabupaten Cirebon	1 Dok	1 Dok	147.638.800	397.638.800	250.000.000
1.03.02.2.01.09.	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Kabupaten Cirebon	10,62 Km	5,86 Km	12.759.604.500	17.459.604.500	4.700.000.000
1.03.02.2.01.24.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Kabupaten Cirebon	0,57 Km	0,39 Km	1.310.965.400	1.310.965.400	-
1.03.02.2.01.46.	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	Kabupaten Cirebon	6,01 Km	26,10 Km	5.360.226.800	7.050.923.600	1.690.696.800

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)
1.03.02.2.02.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		75 Persen	75 Persen	10.826.538.400	31.026.338.200	20.199.799.800
1.03.02.2.02.01.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		1 Dok	2 Dok	107.834.000	377.834.000	270.000.000
1.03.02.2.02.08.	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kabupaten Cirebon	4,19 Km	10,12 Km	5.490.757.400	24.438.557.200	18.947.799.800
1.03.02.2.02.15.	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Kabupaten Cirebon	1 Bendung	1 Bendung	99.442.300	499.442.300	400.000.000
1.03.02.2.02.21.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kabupaten Cirebon	0,35 Km	12,7 Km	5.128.504.700	5.710.504.700	582.000.000
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum		72,34 Persen	72,34 Persen	791.611.200	12.384.356.200	11.592.745.000
1.03.03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Layanan SPAM Sambungan Rumah di Tahun n		0,38 Persen	0,38 Persen	791.611.200	12.384.356.200	11.592.745.000
1.03.03.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Kabupaten Cirebon	2 Dok	1 Dok	143.529.200	143.529.200	-
1.03.03.2.01.02.	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/ Optimalisasi SPAM	Kabupaten Cirebon	1 Dok	1 Dok	148.541.300	348.541.300	200.000.000
1.03.03.2.01.04.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat		880 SR	1 612 SR	-	11.392.745.000	11.392.745.000
1.03.03.2.01.05.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Kabupaten Cirebon	20,29 Liter/Detik	20,29 Liter/Detik	299.540.700	299.540.700	-
1.03.03.2.01.06.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Kabupaten Cirebon	500 SR	0 SR	200.000.000	200.000.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)
1.03.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Prosentase bangunan Penampung Sampah Yang Terbangun		99,52 Persen	99,52 Persen	5.993.184.500	13.183.184.500	7.190.000.000
1.03.04.2.01.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Bangunan Penampungan Sampah di tahun n		75 Persen	75 Persen	5.993.184.500	13.183.184.500	7.190.000.000
1.03.04.2.01.03.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		459.400 Rumah Tangga	459.400 Rumah Tangga	5.993.184.500	13.183.184.500	7.190.000.000
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	prosentase cakupan akses air limbah domestik		81,04 Persen	81,04 Persen	525.884.200	13.493.140.700	12.967.256.500
1.03.05.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Layanan SPALD Rumah Tangga di Tahun n		50,66 Persen	50,66 Persen	525.884.200	13.493.140.700	12.967.256.500
1.03.05.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Kabupaten Cirebon	10 Dok	1 Dok	56.031.300	56.031.300	-
1.03.05.2.01.05.	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Kabupaten Cirebon	130 RT	1.550 RT	469.852.900	13.437.109.400	12.967.256.500
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air		4,57 Persen	4,57 Persen	11.769.554.700	12.819.554.700	1.050.000.000
1.03.06.2.01.	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Panjang Saluran Drainase dan Trotoar Jalan		62,73 Persen	62,73 Persen	11.769.554.700	12.819.554.700	1.050.000.000
1.03.06.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Kabupaten Cirebon	1 Dok	1 Dok	98.142.900	148.142.900	50.000.000
1.03.06.2.01.05.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Kabupaten Cirebon	7.300 Meter	6.180 M	11.671.411.800	12.671.411.800	1.000.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan		2 Persen	2 Persen	11.967.374.200	15.128.270.200	3.160.896.000
1.03.08.2.01.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Prosentase Layanan PBG yang terlayani		100 Persen	100 Persen	11.967.374.200	15.128.270.200	3.160.896.000
1.03.08.2.01.01.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kabupaten Cirebon	100 Dok	100 Dok	545.697.000	731.043.000	185.346.000
1.03.08.2.01.02.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	1 Dok	9 Dok	275.000.000	975.000.000	700.000.000
1.03.08.2.01.04.	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung	10 Dok	10 Dok	56.908.600	71.308.600	14.400.000
1.03.08.2.01.05.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	1 Dok	1 Dok	85.074.600	98.574.600	13.500.000
1.03.08.2.01.12.	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Kabupaten Cirebon	50 Unit	51 Unit	11.004.694.000	13.252.344.000	2.247.650.000
1.03.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase pemenuhan dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan		20 Persen	20 Persen	86.614.000	196.214.000	109.600.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)
1.03.09.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase dokumen sistem bangunan yang tersedia		100 Persen	100 Persen	86.614.000	196.214.000	109.600.000
1.03.09.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		1 Dok	1 Dok	86.614.000	196.214.000	109.600.000
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi Baik		59 Persen	59 Persen	100.987.576.500	122.882.215.462	21.894.638.962
1.03.10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Panjang Jalan Kabupaten yang di rehabilitasi / direkonstruksi ditahun berjalan		8,51 Persen	8,51 Persen	100.987.576.500	122.882.215.462	21.894.638.962
1.03.10.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Kabupaten Cirebon	6 Dok	6 Dok	737.364.600	937.364.600	200.000.000
1.03.10.2.01.04.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Kabupaten Cirebon	3 Dok	3 Dok	377.986.600	377.986.600	-
1.03.10.2.01.08.	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Kabupaten Cirebon	35 Km	26,24 KM	84.721.084.100	93.121.084.100	8.400.000.000
1.03.10.2.01.10.	Peneliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Kabupaten Cirebon	14 Km	17,29 KM	10.718.721.000	13.718.721.000	3.000.000.000
1.03.10.2.01.11.	Peneliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Kabupaten Cirebon	40 Km	120 KM	2.823.219.000	12.823.219.000	10.000.000.000
1.03.10.2.01.16.	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	Kabupaten Cirebon	6 Meter	6 M	1.000.000.000	1.294.638.962	294.638.962
1.03.10.2.01.18.	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Kabupaten Cirebon	7 Meter	7 Meter	609.201.200	609.201.200	-
1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persentase meningkatnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi		80 Persen	80 Persen	439.696.000	439.696.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)
1.03.11.2.01.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		69,23 Persen	69,23 Persen	326.711.800	326.711.800	-
1.03.11.2.01.04.	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Kabupaten Cirebon	80 Orang	80 Orang	159.817.300	159.817.300	-
1.03.11.2.01.07.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kabupaten Cirebon	100 Orang	100 Orang	166.894.500	166.894.500	-
1.03.11.2.04.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		100 Persen	100 Persen	112.984.200	112.984.200	-
1.03.11.2.04.03.	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kabupaten Cirebon	2 Dok	2 Dok	112.984.200	112.984.200	-
1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemenuhan dokumen rencana rinci tata ruang dan ketaatan pemanfaatan ruang		77,91	77,91	618.328.000	1.498.755.000	880.427.000
1.03.12.2.01.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Prosentase tersedianya dokumen kebijakan perencanaan Tata Ruang		50 Persen	50 Persen	279.404.000	1.159.831.000	880.427.000
1.03.12.2.01.03.	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkadam selain RTRW Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	103 Dok	103 Dok	279.404.000	1.159.831.000	880.427.000
1.03.12.2.02.	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase aturan tata ruang yang tersosialisasikan		100 Persen	100 Persen	179.380.000	179.380.000	-
1.03.12.2.02.03.	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kabupaten Cirebon	1 Dok	1 Dok	179.380.000	179.380.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)
1.03.12.2.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1 BA	1 BA	159.544.000	159.544.000	-
1.03.12.2.04.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kabupaten Cirebon	206 Dok	206 Dok	159.544.000	159.544.000	-
						202.934.822.934	289.768.755.696	85.686.060.062

IV. PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon telah sepakat untuk melaksanakan Rencana Kinerja Perubahan yang telah disusun ini demi terwujudnya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. Sebagai suatu instansi pemerintah di Kabupaten Cirebon yang memegang peranan penting dalam mewujudkan infrastruktur yang baik sebagai pendukung perekonomian masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dengan dirumuskan Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon bersiap diri untuk menyongsong kondisi dimasa depan melalui rancangan arah yang akan dicapai dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun ini. Perubahan Rencana Kinerja inilah yang akan mengilhami melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon secara terencana dan terkoordinasikan secara harmonis.

Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon ini diharapkan dapat dikomunikasikan kepada seluruh jajaran unit kerja. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki komitmen bersama untuk maju dari seluruh jajaran unit kerja untuk mendukung keberhasilan pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Pangeran Cakra Buana No. 100 Telp. (0231) 321021 / Fax. (0231) 321341
TALUN – CIREBON – 45171

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
Nomor : 000.7.22/1072 / Sekre
Tanggal : 4 September 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penandatanganan Peraturan Bupati Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2023

30/10/23

Dipermaklumi dengan hormat, bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan Penandatanganan Peraturan Bupati Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG
KABUPATEN CIREBON


Ir. IWAN RIZKI
NIP. 19660223 199303 1 004

Tembusan:
Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.